

## KAGAMA KP PEDULI 2024

### Beri Bantuan Air Bersih 30 Tangki

**GIRIMULYO (KR)** - Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Kabupaten Kulonprogo memberikan bantuan air bersih sebanyak 30 tangki di wilayah Kapanewon Girimulyo. Kagama Peduli 2024 dengan bantuan air bersihnya secara simbolis diserahkan Ketua Kagama Kulonprogo Triyono SIP MSi dengan didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris beserta pengurus lainnya. Bantuan langsung diterima Kepala SMP N 4 Girimulyo Indrati Sayuto, di SMP setempat, Rabu (30/10).

Ketua Kagama Kulonprogo Triyono yang juga menjabat Sekda menuturkan, bantuan air tersebut merupakan wujud kepedulian



**Triyono (dua dari kanan) mengalirkan air bersih.**

Kagama. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kagama Kulonprogo untuk meringankan kebutuhan warga terhadap air bersih. "Kita mengumpulkan dana dan mendistribusikan kepada

sekolah, warga dan lainnya yang terdampak, sehingga bisa meringankan mereka untuk kebutuhan air bersihnya. Bantuan tersebut untuk sekolah, puskesmas, ataupun warga," ujar Triyono. (Wid)

## PEMKAB TERBITKAN SE

### Pengendalian Minuman Beralkohol

**WONOSARI (KR)** - Pemkab Gunungkidul menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 40/2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol ditujukan kepada Para panewu dan Lurah se-Gunungkidul.

Surat edaran tersebut terdiri empat poin tersebut menjadi pengingat terhadap tugas Lurah dan Panewu untuk ikut mengawasi peredaran minuman beralkohol (minol). "Dasar surat edaran ini induknya Perda Gunungkidul No. 4/2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta.

Surat Edaran yang berisi empat poin tersebut menjadi pengingat terhadap tugas Lurah dan Panewu untuk ikut mengawasi peredaran minuman beralkohol (minol). Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol harus terus dilakukan dan SE tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku masyarakat hidup sehat dan menekan tingkat kriminalitas akibat konsumsi minol. Harapannya agar tercipta lingkungan masyarakat aman, tertib,

dan tenteram. "Maka Pemkab menyampaikan kepada Panewu dan Lurah di Gunungkidul," ujarnya.

Ke empat point SE tersebut Pertama, Panewu agar mengkoordinasi para Lurah di wilayah masing-masing untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penertiban peredaran minol. Kedua, Lurah agar melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penertiban peredaran minol di wilayah masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Panewu dan Lurah mendorong peran serta masyarakat dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian peredaran minol dengan cara melaporkan kepada pejabat yang berwenang. "Ke-4, Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran minol," ujarnya.

Ditambahkan penindakan terhadap minol mendasarkan pada kewenangan masing-masing pihak. Pemkab melalui Satpol PP juga dapat melakukan penindakan dengan dasar Perda No. 4/2010. (Bmp)

## TERKENDALA ANGGARAN

### 742 Kilometer Jalan Kategori Rusak

**WONOSARI (KR)** - Akibat terkendala anggaran ratusan kilometer ruas jalan di Kabupaten Gunungkidul mengalami kerusakan dan belum seluruhnya bisa diperbaiki. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) setempat mencatat hingga saat ini ruas jalan sepanjang 742 kilometer masuk dalam kategori rusak dari total jalan kabupaten di Gunungkidul sepanjang 1.136,66 kilometer.

Kerusakan terbagi atas kerusakan kategori ringan 11 persen, rusak sedang 28,5 persen, dan rusak berat 25,8 persen. Sedangkan, jalan kondisi baik sebesar 34,8 persen. "Kondisi kerusakan jalan ini merata di seluruh Kapanewon," kata Kepala DPUPRKP Rakhmadian Wijayanto.

Dengan adanya kerusakan jalan tersebut pihaknya menargetkan melakukan perbaikan jalan di 68 lokasi dengan total panjang 18,7 kilometer, dengan sebesar Rp 40 miliar dari dana APBD. Sampai saat ini dari target tersebut, baru sekitar 60 persen yang terealisasi, pasalnya terkendala anggaran dalam pemerataan

perbaikan infrastruktur terutama jalan.

Agar pembangunan jalan bisa merata memerlukan biaya hingga Rp1 triliun. Dengan anggaran APBD untuk infrastruktur jalan sebesar Rp 40 miliar ini, dipastikan tidak akan mampu mnyasar perbaikan jalan rusak. "Kemampuan anggaran untuk perbaikan jalan rusak terbatas," ujarnya.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPRKP Gunungkidul Wadiyono mena.bahkan sebagai upaya untuk mempercepat perbaikan jalan pihaknya tengah mengusulkan beberapa lokasi jalan untuk perubahan status jalan, jalan Kabupaten menjadi jalan desa. Selain itu juga mengusulkan beberapa ruas jalan kabupaten diusulkan untuk diturunkan statusnya menjadi jalan desa atau kalurahan. Harapannya, agar penanganannya bisa lebih cepat karena bisa memanfaatkan dana desa, atau BSU dari Provinsi. "Untkj usulan penurunsn maupun peningkatan status jalan masih berproses, SK-nya masih kami susun dan dalam waktu dekat ini diharapkan segera terbit,"pungkasnya. (Bmp)

## DIBENTUK SATGAS SEMUA TINGKATAN

### Sehari Produksi Sampah 385 Ton



KR-Endar Widodo

#### Sosialisasi Pembentukan Satgas Siaga Sampah.

**WONOSARI (KR)** - Untuk antisipasi ledakan sampah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk melakukan pengelolaan. Saat ini sedang dilakukan sosialisasi pembentuk Satuan Tugas (Satgas) Siaga Sampah disemua jenjang pemerintahan, dalam hal ini dari pedukuhan, kalurahan, kapanewon dan kabupaten. Rapat sosialisasi yang dberlangsung di ruang Handayani, dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda)

Sri Suhartanta SIP MSi dihadiri Ketua DPRD Dra Endang Sri Sumaryartini MAP, Kadis Lingkungan Hidup (DHL) dan seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), pemuka agama, TNI, Polri, pemuda dan sebagainya. "Sehari produksi sampah di Gunungkidul sudah 385 ton dan baru 55 ton yang dapat diolah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DHL) Antonius Hary

Sukmono ST, Selasa (29/10).

Ditambahkan, dari jumlah sampah tersebut 68 persen merupakan sampah organik, yang 52 persennya merupakan sampah rumah tangga termasuk sampah dapur.

Oleh sebab itu perlu bentuk satuan tugas sampah ditingkat pedukuhan agar dapat mampu membangun kesadaran bersama, setiap kepala keluarga (KK) untuk dapat mengolah sampah dapur tersebut menjadi sampah rumah tangga berbagai produk, kompos misalnya, agar dapat mengurangi ledakan sampah di Gunungkidul. Satgas disetiap tingkatan ini nanti melibatkan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, ormas, pemuda, wanita, TNI, Polri dan sebagainya. (Ewi)

## PENYALAHGUNAAN TKD SAMPANG

### Oknum Lurah Tersangka, Segera Dinonaktifkan Pemkab

**WONOSARI (KR)** - Kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Sampang, Gedangsari, Gunungkidul resmi ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Dalam perkara ini oknum Lurah setempat dinyatakan sebagai tersangka.

Terkait kasus ini Pemkab Gunungkidul sedang memproses penonaktifan oknum Lurah Sampang, Shm menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus penambangan Tanah Kas Desa Sampang tersebut. "Kami akan menonaktifkan oknum Lurah Sampang agar yang bersangkutan bisa fokus

menjalani proses hukum," kata Sekretaris Daerah Gunungkidul Suhartanta.

Sesuai ketentuan perundangan sebelum dilakukannya penonaktifan jabatan Pemkab lebih dulu mendapat surat penetapan tersangka dari Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Nantinya selama Lurah Sampang nonaktif, Pemkab

akan menunjuk pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut. Pejabat dapat berasal dari perangkat kalurahan atau kapanewon atau kecamatan. Harapannya agar tugas pelayanan masyarakat tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. "Bagi oknum lurah agar dapat lebih fokus untuk menjalani proses hukum," ujarnya.

Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pid-sus) Kejari Gunungkidul, Sendhy Pradana Putra SH penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapat alat bukti dan pemeriksaan terhadap 32

saksi. Tanah Kas Desa yang dijadikan kegiatan penambangan tersangka SHM oknum berhasil mengeruk keuntungan sebagai kerugian negara mencapai Rp 506.701.676 dan diketahui dari rekening koran milik Shm. Tersangka Shm tersebut memiliki peran penting dalam kasus penambangan TKD Sampang. Atas dugaan keterlibatan dalam kasus penyalahgunaan TKD ini tersangka SHM disangkakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang (UU) Tipikor Jo Pasal 55 KUHP, Pasal 3 UU Tipikor Jo 55 KUHP dan Pasal 11 UU Tipikor. (Bmp)

## ALKAP DPRD KP TERBENTUK

### Tancap Gas Selesaikan 3 Raperda



KR-Widiastuti

**Ketua DPRD Kulonprogo Aris Syarifuddin (kiri), Wakil Ketua I Lajiyu Yok Mulyono, dan Ketua II Suharto.**

**PENGASIH (KR)** - Alat Kelengkapan (Alkap) DPRD Kabupaten Kulonprogo ditetapkan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang dipimpin Ketua DPRD Aris Syarifuddin dengan didampingi Wakil Ketua I Lajiyu Yok Mulyono

dan Wakil Ketua II Suharto, Rabu (30/10) siang, di Ruang Kresna Gedung DPRD setempat. Selain itu juga ditetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

Aris Syarifuddin menyatakan, setelah alkap terbentuk pihaknya langsung tan-

cap gas, karena masih ada tiga Raperda yakni APBD 2025, Pengarusutamaan Gender dan Perumda Bank Kulonprogo menjadi Bank Perekonomian atau PT. "Ini terutama Raperda APBD 2025 akhir November harus sudah selesai/kita tetapkan. Nanti Banggar menyelesaikan APBD, dan dua panitia khusus/pansus dengan dua raperda lainnya. Intinya semua nanti kita tetapkan sebelum akhir tahun," tandas Aris.

Aris berharap kawan-kawan di DPRD Kulonprogo bekerja cepat untuk menyelesaikan kewajiban. "Semua kompak, semangatnya kawan-kawan adalah semangat berbakti, mengabdikan, yang dibuktikan penyelesaian tiga raperda itu," ujar-

nya. Alkap yang terbentuk terdiri 4 Komisi yakni Komisi I Ketua merangkap Anggota Suryanto, Komisi II Ketua Raden Sunarwan SE, Komisi III Kartono, Komisi IV Edi Priyono SIP. Kemudian, Badan Anggaran (Banggar) beranggotakan 21 orang dengan Ketua merangkap Anggota Aris Syarifuddin, Badan Musyawarah (Bamus) Ketua merangkap Anggota Aris Syarifuddin dengan anggota 21.

Sedangkan Badan Kehormatan (BK) anggota 5 orang dengan Ketua merangkap Anggota Widiyanto SPd, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) beranggotakan 11 orang dengan Ketua merangkap Anggota Rizal Aldyatma. (Wid)

Kedaulatan Rakyat  
**EPAPER**  
www.kr.co.id



Berlangganan  
Scan Barcode



Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.